

## **Bab IV**

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan struktur pada bab II dan makna pada bab III didapatkan kesimpulan bahwa kumpulan cerpen SDCI, khususnya delapan cerpen yang menjadi korpus penelitian, merepresentasikan karakteristik kekuasaan Soeharto yang dijalankan secara sewenang-wenang untuk kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan umum. Hal tersebut teraplikasikan dalam berbagai kebijakan kontroversial pemerintahan orde baru yang menjadi relasi (*denotatum*) kedelapan cerpen korpus penelitian.

Sebelum beranjak kepada relasi (*denotatum*) dan makna (*interpretant*) tersebut, pembahasan berawal dari struktur pada bab II yang terejawantahkan dalam unsur tokoh, latar, alur dan tema. Penokohan yang demikian bervariasi terhadap sosok Soeharto hingga tahap tertentu mempunyai variabel-variabel yang seragam, yaitu dalam deskripsi fisik maupun karakter yang disandingkan kepada masing-masing tokoh tersebut. Meski demikian, tak berarti bahwa semua tokoh dapat diseragamkan begitu saja karena tiap tokoh dalam masing-masing cerpen mempunyai penekanan karakter yang berbeda-beda.

Dari klasifikasi tokoh, diperoleh alur sebagai aplikasi peristiwa dari tokohnya. Masing-masing cerpen mempunyai alur yang koheren dengan alur peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa orde baru atau dengan orde baru itu sendiri. Meski demikian, dalam sebagian cerpen, utamanya “Senotaphium”, alur berujung pada pemikiran futuristik pengarang yang pada dasarnya masih berupa

asumsi. Asumsi yang diperoleh dari pembeda dalam struktur cerpen tersebut tidak dapat disinkronkan secara tepat dengan *denotatum*-nya, melainkan juga dengan *denotatum* yang merupakan asumsi berdasarkan fakta-fakta tertentu.

Latar pada kedelapan cerpen dalam SDCI, meskipun variatif namun menggambarkan latar budaya Jawa. Hal ini merupakan implikasi atas besarnya pengaruh kebudayaan tersebut terhadap nuansa kekuasaan pada pemerintahan orde baru.

Latar fisik berupa deskripsi suasana dan waktu secara tepat berlaku sebagai penanda terhadap kode Indonesia pada masa orde baru. Secara lebih spesifik, latar tempat dalam konteks sebagaimana adanya dalam fakta sosial dan politik orde baru, tetapi terkadang menjadi kode yang hanya memiliki persamaan struktur dan fungsinya. Dari identifikasi tokoh, alur serta latar pada masing-masing cerpen, diperoleh tema tentang bermacam-macam sifat rezimentasi orde baru yang berbeda-beda dalam tiap cerpen.

Berangkat dari pembahasan struktur ditemukan tanda-tanda yang mengarahkan pembacaan kepada *denotatum* berupa relasi masing-masing cerpen dengan aspek rezimentasi Soeharto dalam orde baru.

Cerpen MB berelasi dengan pengeliminasian kelompok oposisi yang terwujud dalam campur tangan pemerintah pada kemelut Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1993.

Selanjutnya cerpen BPT berelasi dengan fenomena KKN yang marak dilakukan pejabat negara pada masa orde baru. Tokoh utama cerpen PG berelasi secara personal dengan sosok Soeharto dalam kapasitasnya sebagai individu dan

kepala negara. Selanjutnya fenomena represivitas berelasi dengan cerpen “Diam dan “Celeng”.

Cerpen BTS berelasi dengan peristiwa seputar kejatuhan Soeharto dari kursi Presiden. “Senotaphium” berelasi dengan peristiwa seputar dihentikannya penyidikan terhadap (mantan) Presiden soeharto, sedangkan cerpen terakhir, GKMR, justru berelasi dengan peralihan kekuasaan dari soekarno ke Soeharto.

Dari pemahaman terhadap relasi masing-masing cerpen, ditemukan pemaknaan pada bab III berupa karakteristik kekuasaan Soeharto yang semuanya negatif, bukan karena kepemimpinan orde baru tidak memiliki sisi positif, melainkan karena sisi tersebutlah yang menonjol dan cenderung disoroti oleh pengarang. Kecenderungan pengarang untuk melihat dari sudut pandang yang seragam demikian bisa jadi mewakili cara pandang rakyat Indonesia secara keseluruhan, karena sastrawan merupakan bagian dari komunitas tersebut. Meskipun demikian tak tertutup kemungkinan pula bahwa kecenderungan tersebut hanyalah ekspresi dari kemarahan subjektif pengarang bersangkutan.

Pemahaman terhadap relasi kedelapan cerpen juga menuntun kepada pemaknaan yang terumuskan dalam enam nilai pokok tentang kekuasaan Soeharto sebagai berikut:

1. Fenomena kudeta dalam peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Sejak awal, soeharto memperoleh kekuasaannya dengan cara manipulatif, sebagaimana terkuak dalam pemaknaan cerpen GKMR;

2. Karakteristik kepemimpinan Soeharto berikutnya yaitu merebaknya budaya KKN yang berawal dari usaha Soeharto dalam memperkaya diri sendiri yang diikuti seluruh jajaran aparatur negara. Hal ini terkuak dalam pemaknaan cerpen BPT;
3. Dalam rangka melindungi kekuasaannya, Soeharto menerapkan kebijakan tangan besi. Segala macam kritik dan beda pendapat tidak dibiarkan tumbuh dan berkembang melainkan ditangani secara overproduktif menggunakan alat-alat negara. Ide tentang represivitas ini mengemuka dalam enam cerpen, artinya hampir keseluruhan menyinggung masalah tersebut;
4. Selanjutnya, rekayasa politik menjadi salah satu cara rezim orde baru untuk mempertahankan kondisi status quo. Dalam situasi tersebut, suasana tenang yang tampak di permukaan berbeda dengan yang terjadi di bawah permukaan tersebut, sebagaimana mengemuka dalam pemaknaan cerpen PG;
5. Masyarakat yang semakin dewasa diam-diam menyimpan keraguan atau bahkan kejenuhan atas kondisi yang ada. Inilah sebenarnya awal dari delegitimasi kekuasaan Soeharto yang tak dapat diidentifikasi waktunya secara tepat karena begitu tersembunyi akibat praktek represi. Proses delegitimasi kekuasaan Soeharto itu baru tampak secara nyata ketika masyarakat telah sampai pada titik jenuhnya, yaitu pada tahun 1997-1998 dan

**berujung pada kejatuhan Soeharto dari kursi presiden. Hal ini mengemuka dalam pemaknaan cerpen PG dan terutama BTS;**

- 6. Meskipun telah jatuh, kondisi status quo yang telah demikian lama begitu kuat menancapkan kekuasaan Soeharto bahkan setelah ia jatuh. Sisa-sisa kekuasaan Soeharto tampak dalam rekayasa penghentian penyidikan terhadap kasusnya yang menjadi relasi cerpen “Senotaphium”**

**Berbagai fenomena penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Soeharto sebagai makna kedelapan cerpen dalam kumpulan cerpen SDCI tersebut mengacu kepada sebuah kondisi otoritarian. Hal demikian dapat dilakukan oleh siapapun yang memegang kekuasaan apabila mekanisme kontrol, baik dari dalam diri ataupun dari luar, tidak berjalan dengan baik. Artinya, sebagai kondisi yang universal, fenomena tersebut harus diantisipasi secara dini oleh pemerintahan manapun dan dalam lingkup apapun.**

*Mutiara*

DAFTAR PUSTAKA